

**DINAMIKA KEBUDAYAAN DI KOTA GIANYAR :  
Dari Kota Keraton sampai Kota Seni, 1771 – 1980-an**

**A.A. Bagus Wirawan  
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra  
Unud Denpasar**

**Disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII di  
Jakarta 14 – 17 Nopember 2006**

## 1. Landasan Tipologi Kota.

Dalam proses sejarah, sebagian besar kota berasal dari komunitas elite bangsawan atau berkat adanya pasar. Kebutuhan ekonomi dan kebutuhan politik daerah milik seorang bangsawan dapat mendorong orang untuk melakukan perdagangan guna memenuhi permintaan yang hanya dapat terlaksana dengan bekerja ataupun dengan menukar barang. Dalam kota yang berasal dari komunitas seperti itu, barang keperluan keraton, dan istana bangsawan (*puri*) itu seringkali merupakan sumber pendapatan, bahkan merupakan sumber pokok bagi penduduk daerah. Apabila kondisi demikian itu merupakan konfigurasi yang berlainan dengan desa, maka wajarlah bila kota itu menjadi tempat tinggal raja, para bangsawan, *baudanda bhagawanta* (keraton, *puri*) maupun tempat pasar, *bencingah*, alun-alun, dan lain-lainnya (Sartono Kartodirdjo, 1977).

Landasan tipologi terbentuknya kota Gianyar dan untuk memahaminya mengikuti sejarah perkembangan kota, lokasi serta ekotipenya, fungsinya, dan unsur-unsur sosio-kultural adalah menggunakan konsep dan tipe-tipe kota seperti yang terdapat di pelbagai negeri (Sartono Kartodirdjo, 1977). Akan tetapi, untuk menyoroti kota Gianyar akan dipilih tipe kota yang relevan terutama kota-kota kuno di Asia (M. Irfan Mahmud, 2003 : Bab II).

Di kota-kota Asia, apa yang disebut *gilde* belum sepenuhnya terlepas dari ikatan kerabat seperti ikatan klan; (*kewangsaan*) yang sebagai suatu komunitas ingin memegang monopoli dalam suatu pertukangan serta pemasaran hasil karyanya. Dalam kegiatan tukar menukar barang, muncul pula orang-orang asing misalnya Cina atau Arab. Mengenai lokasi kota-kota dapat dikatakan bahwa kota terletak di berbagai lokasi. Suatu lokasi yang sangat kuno ialah puncak gunung atau tempat yang tinggi di mana kota

didirikan untuk keperluan pertahanan. Selanjutnya perluasannya dapat meliputi daratan rendah atau pantai. Arti kota ekonomi itu sering mendorong perluasan ke suatu pelabuhan atau sungai yang dapat dilayari (Sartono Kartodirdjo, 1977).

Ekotipe kota atau komunitas sosial yang berkembang sangat ditentukan oleh pembagian pekerjaan, antara lain, prajurit, pedagang, pengerajin, yang pada umumnya tinggal di lokasi yang terpisah-pisah. Di kota-kota kuno, pada umumnya kuil atau tempat ibadah menjadi pusat dan lambat laun kota itu berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan serta hiburan. Ada pula kota-kota yang berpusat pada bangunan pertahanan seperti benteng yang kemudian meluas dan mencakup tempat aktivitas perdagangan. Kota-kota di Asia banyak berpusat pada keraton (istana raja) sedangkan pelbagai lembaga terletak di bagian lain dari kota itu. Pada masa lampau selama berabad-abad, permukaan kota hanya merupakan titik yang tidak berarti di tengah paya-paya, hutan rimba, dan padang belantara. Pemusatan penduduk di tepi beberapa sungai besar, seperti Indus, Tigris, atau di pantai Lautan Tengah, menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, kerajinan, dan peribadahan. Pendeknya mencakup semua aktivitas kebudayaan (Sartono Kartodirdjo, 1977). Kota pelabuhan yang sekaligus menjadi pusat kerajaan (misalnya Sriwijaya) merupakan komunitas pedagang dari pelbagai golongan etnik yang berasal dari segala penjuru. Tujuan komersiallah yang memungkinkan kehidupan bersama serta memelihara suasana terbuka, suatu kondisi yang sangat berbeda apabila dibandingkan dengan keadaan masyarakat pedalaman (Mataram Hindu di Jawa). Selain itu, ada kota yang merupakan pusat pertahanan juga sekaligus menjadi pusat pemerintahan, tempat kediaman raja, dan pusat agama (Islam, Yogyakarta).

Fungsi kebudayaan kota tercermin pada struktur ekotipenya, yaitu sebagai pusat ibadah, keraton, dan benteng. Konsentrasi kekuasaan kultural dan fisik mendorong terjadinya komunikasi dan kerjasama sesama warga sehingga dapat mempertinggi

keaktivitas dan produktivitas mereka. Dengan demikian, nyata bahwa kota menjadi sinonim dengan kebudayaan. Selain itu, pelbagai institusi seperti pemerintahan, pusat pemujaan dan upacara, pasar, alun-alun, hiburan akan memperkuat integrasi antara golongan penduduk. Oleh karena itu, kota akan tetap berfungsi untuk mengubah kekuasaan menjadi bentuk, energi menjadi kebudayaan, dan materi menjadi lambang kesenian. Ketiganya itu merefleksikan kreativitas manusia, yang melalui media itu berusaha merealisasikan dirinya, menemukan identitasnya sebagai makhluk yang berbudaya (Sartono Kartodirdjo, 1977). Konsep tipologi dan teori tentang terbentuknya kota digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan predikat yang melekat pada kota Gianyar secara prosesusual di fasal-fasal yang akan dibahas. Akan tetapi untuk menguatkan tipologi dan pemberian predikat terhadap kota Gianyar yang telah terbangun pada tahun 1771 perlu diketahui beberapa contoh pemberian predikat dari kota-kota lainnya di Nusantara untuk dijadikan pembandingan sekaligus landasan pemberian predikat bagi kota Gianyar yang saat ini berstatus kota kabupaten.

Dalam buku *Jakarta Kota Perjuangan, Jakarta Kota Proklamasi Januari 1945 – Januari 1946*, ditulis oleh Susanto Zuhdi, diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1995, dinyatakan bahwa hari jadi kota Jakarta jatuh pada tanggal 22 Juni 1527 (Susanto Zuhdi, 1995). Dari segi ekotipe kota, Jakarta adalah tipe kota bandar atau pelabuhan, di Teluk Jakarta. Kota ini bermula dari sebuah komunitas pada masa Kerajaan Tarumanegara dan kemudian menjadi bandar Kerajaan Padjajaran, dengan nama Kalapa atau lebih dikenal sebagai Sunda Kelapa. Menurut Sukanto, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta oleh Fatahillah pada tanggal 22 Juni 1527 setelah pimpinan pasukan Demak ini mengalahkan tentara Portugis. Nama Jayakarta yang dapat dilafalkan dengan beberapa ragam, Jayakarta, Jakarta, Jaketra, atau Jacatra, sesungguhnya telah berumur lebih dari empat abad dari tahun 1995. Ketika Belanda dengan VOC (kongsi dagang

Hindia Timur) menancapkan kukunya di bumi Nusantara, nama Jayakarta diganti menjadi Batavia pada tahun 1691. Namun, ketika pendudukan balatentara Jepang berhasil menggantikan kekuasaan Hindia Belanda di Batavia, pemerintah Jepang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta pada tanggal 8 Desember 1942. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Pemerintah RI memutuskan Jakarta sebagai ibukota negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemerintah DKI Jakarta menetapkan bahwa hari jadi kotanya selalu mengacu pada tanggal 22 Juni 1527, bukan momentum pada tanggal lainnya seperti proses perubahan nama yang sudah disebutkan di atas. Setelah mengalami proses perkembangan dan dari proses perjuangan bangsa Indonesia berkulminasi pada tonggak peristiwa 17 Agustus 1945 maka predikat yang melekat bagi kota Jakarta adalah “kota perjuangan” sekaligus “kota proklamasi” (Susanto Zuhdi, 1995).

Sebuah kajian penelitian yang dilakukan oleh tim dari Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Yogyakarta tentang hari jadi kota Yogyakarta pantas untuk diketahui. Hasil kajian tim telah menunjukkan bahwa hari jadi kota Yogyakarta ditandai oleh dibangun dan difungsikannya Keraton Yogyakarta Hadiningrat sebagai pusat pemerintahan Kasultanan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 7 Oktober 1756. Temuan tim sejarawan UGM, apa yang diperingati sebagai hari jadi kota Yogyakarta yang didasarkan pada keputusan pemerintah RI tentang Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947 yang dikenal selama ini, merekomendasikan untuk ditinjau ulang (Tim Pengkajian, 2003). Disusul dengan terbitnya sebuah buku yang diberi judul *Yogyakarta ibukota Republik Indonesia*, terbit di Yogyakarta tahun 2002,. Buku edisi lux yang ditulis oleh Suhartono WP dan anggota timnya dengan jelas menyatakan bahwa berdasarkan proses sejarahnya berbagai predikat telah diberikan untuk kota Yogyakarta. Bermula dari “Kota Keraton” yang didirikan oleh Sultan Hamengkobuwono I pada tanggal 7 Oktober 1756. Selanjutnya berbagai predikat diberikan untuk kota Yogyakarta seperti “Kota

Perjuangan”, “Kota Revolusi”, “Kota Pelajar”, dan terakhir “Kota Budaya dan pariwisata” (Suhartono WP, dkk, 2002).

Sebuah buku yang berjudul *Syarif Abdurrahman Alkadri: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, ditulis oleh Ansar Rahman dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh pemerintah kota Pontianak pada tahun 2000 memberikan gambaran tentang proses lahirnya kota Pontianak, Kalimantan Barat. Penulis menggambarkan kembali fenomena historis kelahiran kota Pontianak dengan menggunakan momentum berdirinya kerajaan atau Kasultanan Pontianak dan tokoh pendirinya. Pengalaman mengembara dan sukses berdagang dari seorang tokoh yang bernama Syarif Abdurrahman Alkadri mendorong dia untuk mendirikan pusat perdagangan dan pusat kekuasaan Islam di Pontianak. Tokoh putra asli Kalimantan Barat ini kemudian menjadi Sultan yang membangun dan mendirikan Kasultanan Pontianak yang berdaulat penuh dan otonom pada tanggal 23 Oktober 1771 (Ansar Rahman, 2000). Dewasa ini, pemerintah Kota Madya Pontianak merayakan hari jadi kotanya pada tonggak sejarah peranan raja Islam (sultan) Syarif Abdurrahman Alkadri (1739 – 1808) membangun Kasultanan Pontianak pada tanggal 23 Oktober 1771. Oleh karena itu Kodya Pontianak dapat diberi predikat “Kota Muslim” hingga sekarang. Sesungguhnya periode abad-abad ke-13 dan abad ke-18 menjadi ciri pertumbuhan dan perkembangan kota-kota muslim dari pesisir hingga kepedalaman di Nusantara (H. Uka Tjandrasasmita, 2000).

## **2. Kota Keraton Gianyar, 1771 – 1960.**

Dua seperempat abad lebih, tepatnya 233 tahun yang lalu, 19 April 1771, sampai diperingati hari jadinya pada 19 April 2004. Ketika kota yang dalam perkembangan selanjutnya nama Gianyar dipilih menjadi nama sebuah keraton istana raja yaitu Puri Agung Gianyar oleh Ida Dewa Manggis Shakti, maka sebuah kerajaan yang

berdaulat penuh dan otonom telah lahir serta ikut dalam pentas percaturan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali. Persyaratan upacara *skala niskala* untuk berfungsinya Puri Agung Gianyar, keraton sebagai ibukota pusat pemerintahan kerajaan 19 April 1771 itu dapat dijadikan tonggak sejarah lahirnya kota keraton Gianyar (Mahaudiana, 1988 : 30). Dari tonggak sejarah yang telah ditegakkan oleh raja (*Ida Anake Agung*) Gianyar I, Ida Dewa Manggis yang menggunakan nama alias Manggis Api, Manggis Shakti, dan Manggi Sukawati memberi isyarat kepada pembaca bahwa proses menjadi dan ada itu bisa ditarik ke belakang (masa sebelumnya) atau ditarik ke depan (masa sesudahnya) yang senantiasa menunjukkan nuansa seni dengan segala dinamika dan perkembangannya. Perlu dipahami bahwa sesempit apa pun wilayah kekuasaan kerajaan pada saat baru dibangun tidak akan mengurangi status kedaulatan dan otonomi kerajaan itu memberu peluang semaraknya kreativitas produk kesenian.

Secara geografis, wilayah yang sejak dahulu disebut Gianyar itu ternyata mengalami proses yang telah berlangsung berabad-abad sebelum tonggak sejarah yang sudah disebut di atas dan hanya dua seperempat abad lebih sesudahnya. Karena itu, pemahaman akan semakin menarik jika generasi sekarang mampu merekonstruksinya dan menangkap makna untuk dijadikan spirit (revitalisasi) menghadapi tantangan saat ini dan yang akan datang.

Berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di wilayah dan kawasan Gianyar, dapat diduga bahwa telah muncul komunitas di Gianyar sejak 6000 tahun yang lalu. Itu terkait dengan ditemukannya situs atau perkakas (arefak) berupa batu, logam perunggu yaitu nekara (*bulan Pejeng*), relief yang menggambarkan kehidupan dan candi atau gua di tebing-tebing sungai (*Tukad*) Pakerisan sebagai produk berkesenian pada tahap awal (Sutaba, 1980). Setelah ditemukan bukti-bukti tertulis berupa prasasti di atas batu atau logam dapat diidentifikasi situs pusat kerajaan dari dinasti Warmadewa di

Keraton Singamandawa, Bedahulu. Setelah ekspedisi Gajah Mada (Majapahit) dapat menguasai pulau Bali, maka di bekas pusat markas laskarnya didirikan sebuah keraton, yaitu Keraton Samprangan kemudian menjadi sebuah desa di kabupaten Gianyar. Keraton ini merupakan pusat pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh raja adipati (*Ida Dalem*) Kresna Kepakisan (1350 – 1380). Dia adalah pendiri dari dinasti Ida Dalem Kresna Kepakisan. Keraton Samprangan berusia lebih kurang tiga warsa kemudian keraton pusat kerajaan Bali itu dipindahkan ke Gelgel oleh putra bungsunya beliau yang bernama Ida Dalem Ketut Ngulesir, (1380 – 1460) raja adipati di Bali. Keraton Gelgel kemudian diberi nama Swecalingarsapura dan berlangsung lebih kurang tiga abad. Selama pusat pemerintahan berada di Gelgel ada lima raja dari keturunan Ida Dalem Kresna Kepakisan yang memerintah yaitu : Ida Dalem Ketut Ngulesir (1380 – 1460), Ida Dalem Waturenggong (1460 – 1550), Ida Dalem Bekung (1550 – 1580), Ida Dalem Segening (1580 – 1630), dan Ida Dalem Dimade (1630 – 1651). Selama periode 1651 – 1686 kekuasaan pemerintahan di Gelgel diambil alih oleh I Gusti Agung Maruti, dari keturunan Arya Kepakisan (*Babad Dalem, passim*).

Cikal bakal penguasa (raja) yang kemudian dikenal sebagai daerah Gianyar berasal dari keturunan Dalem Segening dan Ida Dalem Dimade. Sementara itu, pada periode yang bersamaan muncul juga dua pusat kekuasaan, yaitu I Gusti Ngurah Jelantik di Blahbatuh dan I Gusti Agung Maruti di Keramas, keduanya berasal dari keturunan Arya Kepakisan, kemudian daerah kekuasaannya diserahkan dan dimasukkan ke wilayah kerajaan Gianyar (*Babad Dalem; C.C. Berg, 1932*).

Periode Gelgel berakhir dengan kekalahan dan berakhirnya kekuasaan I Gusti Agung Maruti pada tahun 1686. Salah satu putra dari Dalem Dimade yang bernama I Dewa Agung Jambe dan dengan didukung oleh laskar gabungan (Singarsa, Denbukit, Badung dan laskar *pering gading oncer ganda* dari desa Beng) dapat merebut kembali

tahta kerajaan. Selanjutnya, para anglurah yang memimpin laskar gabungan sepakat menobatkan Ida I Dewa Agung Jambe sebagai raja (*Ida Dewa Agung*). Ida I Dewa Agung Jambe selanjutnya memindahkan keraton pusat pemerintahannya ke Klungkung, yang dinamai Keraton Semarapura. Periode Klungkung sebagai kerajaan yang berdaulat dan memiliki otonomi penuh berlangsung dua abad lebih, tepatnya 222 tahun (1686 – 1908).

Salah seorang putra Ida Dalem Segening yang bernama Ida I Dewa Manggis Kuning (1600-an) adalah cikal bakal dinasti Manggis yang kemudian muncul setelah generasi IV. Sementara itu, salah seorang putra Ida Dalem Dimade yang bernama Ida I Dewa Agung Pelayun (1640-an) adalah cikal bakal dinasti Pelayun yang muncul setelah generasi II dan yang membangun keraton-keraton pusat kekuasaan di Tampaksiring, Pejeng, dan Kerajaan Payangan (1735 – 1843) kemudian termasuk wilayah kerajaan Gianyar. Salah seorang putra dari Ida I Dewa Agung Jambe yang bernama Ida I Dewa Agung Anom muncul sebagai cikal bakal dinasti raja-raja yang berkuasa di keraton Sukawati (1711 – 1771). Daerah kekuasaannya kemudian diambil alih oleh raja Gianyar pada tahun 1771 (*Babad Dalem; Babad Dalem Sukawati*).

Ketiga cikal bakal penguasa yang muncul di Gianyar yang berasal dari dinasti Ida Dalem Kresna Kepakisan sejak periode Gelgel sampai periode Klungkung mengalami pergumulan, silih-berganti, pasang-surut, malang melintang untuk menuju puncak kekuasaan kerajaan, baik dengan cara kekerasan maupun secara damai. Dinamika pergumulan antara elite tradisional dari generasi ke generasi telah berproses. Pada momentum tertentu, salah seorang di antaranya adalah pembangun kota keraton, atau kota kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang disebut Gianyar. Pembangun kota kerajaan yang berdaulat dan memiliki otonomi penuh adalah Ida I Dewa Manggis Shakti, generasi keempat dari Ida I Dewa Manggis Kuning. Berdirinya Puri Agung Gianyar 19 April 1771, yang sekaligus menjadi ibukota, dan pusat pemerintahan

Kerajaan Gianyar dipakai sebagai tonggak sejarah. Sejak itu Kerajaan Gianyar yang berdaulat ikut mengisi lembaran sejarah kerajaan-kerajaan di Bali, yang terdiri atas sembilan kerajaan yaitu: Klungkung, Karangasem, Buleleng Mengwi, Bangli, Payangan, Badung, Tabanan, dan Gianyar. Namun, sampai akhir abad ke-19, setelah runtuhnya Kerajaan Payangan dan Mengwi di satu pihak dan munculnya Jembrana di lain pihak, maka hanya ada delapan kerajaan di Bali (*asta negara*), yaitu : Klungkung, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Bandung, Bangli, dan Gianyar (*ENI*, 1971).

Petunjuk tertulis dalam dokumen arsip Belanda memberikan bukti kuat bahwa kerajaan Gianyar yang memiliki otonomi dan kedaulatan wilayah, kekuasaannya diakui oleh kekuasaan asing Belanda atau kekuasaan pribumi, raja-raja di Bali. Surat perjanjian pertama, antara Letkol van Swieten dari pihak *Gubernemen* Hindia Belanda dan Ida I Dewa Pahang dari pihak Kerajaan Gianyar, ditandatangani pada tanggal 25 Juli 1849. Isi perjanjian itu adalah kerjasama bantu membantu antara pihak kerajaan pribumi dan pihak asing Gubernemen, yang sama-sama memiliki otonomi dan kedaulatan atas wilayah kekuasaannya dan yang secara kenegaraan keduanya berstatus sederajat (*ANRI*, 1964). Perlu diketahui sejak didirikannya Kerajaan Gianyar oleh raja yang pertama, yaitu Ida I Dewa Manggis Shakti pada tahun 1771 sampai ditandatanganinya surat perjanjian dengan pihak *Gubernemen* oleh Ida I Dewa Pahang (1847 – 1892) yang juga bergelar Ida I Dewa Manggis Mantuk Di Satria, telah terjadi beberapa kali suksesi pewarisan takhta.

Sesudah wafatnya Ida I Dewa Manggis Shakti sebagai peletak dasar Kerajaan Gianyar yang berdaulat penuh, tahta kerajaan diwariskan kepada putera mahkota yang bergelar Ida I Dewa Manggis Di Madya (1814 – 1839), raja Gianyar II. Kekuasaannya berakhir karena wafat kemudian digantikan oleh putera mahkota yang bergelar Ida I Dewa Manggis Di Rangki (1839 – 1847), raja Gianyar III. Kekuasaannya singkat, hanya berlangsung delapan tahun dan berakhir karena wafat.

Pewaris tahta berikutnya adalah Ida I Dewa Pahang atau Ida I Dewa Manggis Mantuk Di Satria (1847 – 1892), raja IV. Gelar Mantuk Di Satria itu diberikan untuk mengingatkan pada peristiwa bahwa raja ini wafat dalam pengasingan (1885 – 1892) di Satria (Klungkung). Pengasingan itu melibatkan intervensi dari pihak Ida I Dewa Agung di Kerajaan Klungkung. Raja Gianyar IV, Ida I Dewa Pahang (menurut sumber Belanda) dimusuhi oleh raja-raja Klungkung, Bangli, Badung, Tabanan, dan Mengwi. Setelah Ida I Dewa Pahang berhasil diperdaya dan ditawan oleh Ida I Dewa Agung di Klungkung pada tahun 1885, tahta di keraton Gianyar mengalami kekosongan sampai wafatnya Ida I Dewa Pahang di pengasingan Satria (Klungkung) pada tahun 1892. Selanjutnya, wilayah kekuasaan kerajaan Gianyar dikuasai oleh kerajaan Bangli dan kerajaan Klungkung.

Ketika Ida I Dewa Manggis Mantuk Di Satria wafat di Satria (Klungkung), kedua puteranya, yaitu Ida I Dewa Pahang dan adiknya Ida I Dewa Gde Raka beserta keluarganya berhasil lolos meninggalkan tempat pengasingan untuk kembali ke Gianyar pada bulan Januari 1893. Berkat dukungan para punggawa yang masih setia di Gianyar, Ida I Dewa Pahang, raja Gianyar V (1893 –1896), berhasil membebaskan Kerajaan Gianyar dari cengkraman pendudukan raja-raja tetangga sehingga Kerajaan Gianyar berdaulat kembali. Setelah wafat digantikan oleh adiknya yang bernama Ida I Dewa Gde Raka, sebagai raja Gianyar VI. Atas dasar musyawarah dan mufakat dari para manca, punggawa dan dukungan rakyat di Kerajaan Gianyar, maka dinobatkanlah Ida I Dewa Gde Raka, adik dari raja Gianyar V, sebagai raja Gianyar VI (1896 – 1912) (ANRI, 1964).

Upacara resmi penobatan sesuai dengan tradisi Bali (*mabiseka ratu*) Ida I Dewa Gde Raka sebagai raja Gianyar VI ini sangat unik karena dilaksanakan setelah penyerahan kedaulatan kerajaannya kepada pemerintah Belanda. Keputusan Ida I Dewa Gde Raka, raja Gianyar VI untuk menempatkan diri di bawah perlindungan dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1900 adalah karena alasan

permusuhan yang tidak pernah henti dengan kerajaan-kerajaan tetangga yaitu : Badung, Mengwi, Bangli, dan Klungkung. Situasi pada akhir abad ke-19 itu sangat mengacaukan kehidupan di Kerajaan Gianyar. Pertimbangan yang matang dari seorang pemimpin dan juga raja yang sangat memperhatikan *kawulanya* itu memperoleh perlindungan dari pihak *Gubernemen* itu dapat diterima dengan baik pada waktu itu. Tujuannya adalah untuk mencari tempat berlindung guna menyelamatkan kerajaan dari keruntuhan karena diancam dan diserang oleh empat kerajaan tetangga dari pelbagai penjuru, seperti yang disebutkan di atas (Agung, 1989).

Untuk menangkis tekanan-tekanan kerajaan tetangga, raja Gianyar Ida I Dewa Raka meminta bantuan kepada Karangasem I Gusti Gde Jelantik pada tahun 1898. Akan tetapi, karena status Kerajaan Karangasem sudah menjadi *stedehouder* (wakil) pemerintah *Gubernemen*, maka permintaan tersebut dikonsultasikan dulu kepada residen di Singaraja. Keputusan yang diterima ialah bahwa Residen Lieftrinck menolak usul I Gusti Gde Jelantik dengan alasan agar kerajaan yang merupakan bagian (wakil) pemerintah *Gubernemen* tidak terlibat dalam sengketa antar kerajaan di Bali (Agung, 1989).

Raja Gianyar, Ida I Dewa Raka putus asa atas penolakan bantuan dan berusaha memohon bantuan lagi kepada pemerintahan *Gubernemen*, Residen Lieftrinck pada tanggal 28 Desember 1899 dan pada tanggal 8 Januari 1900. Isinya yang terpenting adalah penyerahan kerajaan Gianyar kepada pemerintah *Gubernemen*, dengan alasan untuk lestarnya lembaga-lembaga yang ada dan menghindari kepungan musuh dari segala penjuru (Agung, 1989). Karena lama tidak mendapat jawaban dari Residen Lieftrinck atas suratnya, raja Gianyar selanjutnya mengirim surat susulan pada tanggal 14 Januari 1900. Sementara itu Ida I Dewa Agung di Klungkung menawarkan perdamaian dengan raja Gianyar, Ida I Dewa Raka. Tawaran tersebut disertai dengan suatu imbalan bahwa Ida Dewa Agung bersedia menjadi perantara dengan raja-raja lain di Bali, terutama

raja Bangli untuk menghentikan permusuhan dan peperangan dengan Kerajaan Gianyar, asalkan Kerajaan Gianyar bersedia mengakui kekuasaan tertinggi Ida Dewa Agung Klungkung. Meskipun tawaran perdamaian tersebut tidak mendapat respons yang menggembirakan dari sebagian besar punggawa Kerajaan Gianyar, raja Gianyar tidak dapat menolak tekanan Ida Dewa Agung Klungkung untuk mengadakan perdamaian. Perdamaian antara Ida Dewa Agung Klungkung dengan raja Gianyar akhirnya dikukuhkan juga dengan suatu upacara sumpah yang berlangsung di Pura Kentel Gumi, Banjarrangan pada tanggal 26 Januari 1900 (Agung, 1989).

Peristiwa sumpah perdamaian itu dilaporkan oleh raja Gianyar, Ida I Dewa Gde Raka kepada Residen Liefrinck dalam suratnya tertanggal 17 Februari 1900. Disampaikan dalam suratnya itu bahwa perdamaian disetujui karena raja Gianyar berada dalam keadaan sulit dan meminta jawaban atas permohonan penggabungan Kerajaan Gianyar ke dalam pemerintah *Gubernemen*. Surat yang terakhir ini dipertimbangkan masak-masak oleh Residen dan dikonsultasikan kepada Gubernur Jenderal di Batavia (Agung, 1989).

Permohonan saran dan argumentasi yang disampaikan Residen Liefrinck dibalas dengan sebuah keputusan Gubernur Jenderal yang disampaikan oleh sekretaris Umum Hindia Belanda dengan kawat tanggal 28 Februari 1900. Isinya menerima tawaran raja Gianyar agar ditempatkan dalam hubungan yang sama dengan *Gubernemen* seperti Karangasem. Selain petunjuk di atas, Residen Liefrinck mendapat instruksi dari Gubernur Jenderal untuk menyelidiki kemungkinan penempatan seorang pejabat Belanda di Gianyar. Berdasarkan instruksi tersebut, Liefrinck bertolak ke Gianyar untuk mengadakan perundingan dengan raja Gianyar dan para punggawa kerajaan tersebut guna menyelesaikan masalah Gianyar.. Dengan menumpang kapal pemerintah *Condor*, Liefrinck disertai oleh kontrolir urusan politik dan agraris, H.E.J.F. Schwatz dan dua punggawa dari Buleleng, mereka berlabuh di pantai Lebih pada tanggal 5 Maret 1900.

Residen dengan rombongan diterima oleh para pembesar Kerajaan Gianyar dan diantar ke Ibukota dan mereka menginap di Puri Agung Gianyar (Agung, 1989). Pertemuan berlangsung selama sehari penuh pada tanggal 7 Maret 1900.

Untuk menjamin kelangsungan pemerintahan, maka dimuat ketentuan tentang pengangkatan Ida I Dewa Gde Raka, raja Gianyar VI untuk sementara waktu sebagai *stedehouder* (wakil) pemerintah Hindia Belanda di Gianyar. Sambil menunggu keputusan tetap mengenai pengangkatannya dari Gubernur Jenderal, dan raja bertindak sebagai wali negeri yang baik, seperti yang berlaku di Karangasem. Pada hari Kamis malam tanggal 8 Maret 1900, berita acara tersebut ditandatangani oleh residen Liefrinck dan Ida I Dewa Gde Raka. (Agung, 1989). Isinya menegaskan bahwa Ida I Dewa Gde Raka, raja di Kerajaan Gianyar berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan yang diemban sebagai *stedhouder* (wakil) pemerintah Hindia Belanda senantiasa akan memerintah kerajaan Gianyar sebagai seorang wali negeri yang baik dan setia kepada pemerintah Hindia Belanda.

Dengan keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 29 November 1900 No.15, ditetapkan bahwa Ida I Dewa Gde Raka dikukuhkan dalam kedudukan dan martabatnya sebagai *Stedehouder* (wakil) pemerintah Hindia Belanda di Kerajaan Gianyar (Agung, 1989). Pelantikannya dilakukan dengan suatu upacara yang disaksikan oleh semua punggawa di Kerajaan Gianyar pada tanggal 2 Januari 1901. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juni 1903 Ida I Dewa Gde Raka dinobatkan dalam suatu upacara penobatan menurut adat agama (*mabiseka ratu*) sebagai raja Gianyar dengan gelar Ida I Dewa Manggis, seperti lazimnya dipakai oleh raja-raja yang berkuasa di Gianyar turun-temurun (sejak Ida I Dewa Manggis Shakti).

Selama satu dekade, sejak penobatan Ida I Dewa Gde Raka sebagai *stedehouder* terjadilah suksesi kepemimpinan. Beliau mengundurkan diri secara sukarela

dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah *Gubernemen* pada tanggal 12 Mei 1912. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal pada tanggal 11 Januari 1913, Ida I Dewa Gde Raka diberhentikan dengan hormat sebagai *Stedehouder* di Kerajaan Gianyar. Sementara itu, di Bangli juga terjadi suksesi karena Dewa Gde Tangkeban, raja Bangli wafat pada tahun 1912. Baik Ida I Dewa Ngurah Agung yang menggantikan ayahnya, Ida I Dewa Gde Raka (Ida I Dewa Manggis VIII) di Gianyar maupun pengganti Dewa Gde Tangkeban di Bangli tidak diberi gelar *stedehouder* oleh pemerintah Gubernemen. Akan tetapi mereka diangkat sebagai *regent* untuk kepala pemerintahan di Gianyar atau daerah-daerah yang disamakan pada waktu itu berlangsung sampai tahun 1929. Oleh J. Caron sebagai residen Bali dan Lombok pada waktu itu diadakan perubahan tata pemerintahan di Bali.

Berdasarkan prinsip bahwa pulau Bali adalah suatu wilayah yang langsung berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, maka mulai tahun 1929 pulau Bali dibagi menjadi delapan *resort* (daerah) pemerintahan. *Resort* (daerah) pemerintahan itu adalah Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem. Tiap-tiap *resort* pemerintahan dikepalai oleh seorang pribumi putra warga Bali yang akan ditunjuk, dari keturunan raja-raja yang dahulu memerintah kerajaan-kerajaan di Bali. Untuk *resort* pemerintahan Karangasem, Bangli, dan Gianyar tidak perlu diadakan penunjukan kepala pemerintahan baru, karena di sana keturunan raja-raja yang berkuasa terdahulu di tiga kerajaan tersebut sudah memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan (Agung, 1989). Akan tetapi, untuk daerah-daerah lainnya, residen J. Caron mengadakan penyelidikan seksama siapa-siapa yang dianggap masih keturunan terdekat dari dinasti kerajaannya masing-masing. Keseragaman tata pemerintahan di Bali dapat diwujudkan pada tahun 1929. Pulau Bali dibagi menjadi delapan *resort* pemerintahan yang diberi nama Bali asli yaitu *negara* di bawah pimpinan kepala-kepala pemerintahan

yang ditunjuk dari keturunan raja-raja Bali terdahulu. Para kepala pemerintahan di tiap-tiap *negara* diberi gelar *negara berstuuder* (penguasa Negara) dengan disertai pengukuhan gelar tradisional yang menyerupai tradisi yang berlaku di tiap-tiap kerajaan.

Ida I Dewa Ngurah Agung, sejak tahun 1929 dikukuhkan oleh pemerintah *Gubernemen* dengan dua gelar yaitu secara modern (*Bestuurder*) atau secara tradisi adat di negara Gianyar (*Anak Agung*). Kepala pemerintahan pribumi (*Bestuurder, Anak Agung*) yang baru dibentuk ini memiliki tiga ciri dalam sistem pemerintahannya, yaitu pemerintahan rangkap, adanya jabatan *patih* sebagai pembantu raja, dan adanya dewan kerajaan. *Patih* raja Gianyar berasal dari keturunan Pasek, sedangkan dewan kerajaan (*pesamuan agung*) terdiri dari pembesar kerajaan, yaitu para punggawa, para manca, para pendeta (W.F. van der Kaaden, 1937). Keistimewaan dalam sistem pemerintahan di Gianyar adalah pembentukan korps abdi raja yang disebut *prayoda* pada tahun 1936. Pembentukan korps tersebut yaitu diilhami oleh barisan sebagai abdi *Sentana* di Madura (Kuntowijoyo, 2002).

Selama Pemerintahan *stedehouder* dan *regent* (1913 – 1929) kemudian *bestuurder* sampai tahun 1938 dan selama Anak Agung Ngurah Agung, raja Gianyar VII (1913 – 1943) memimpin daerah kerajaannya suasana aman dan tertib mewarnai kehidupan masyarakatnya. Secara perlahan bakat alam bersentuhan dengan kemampuan berkreasi para warganya. Kreativitas waktu-waktu luang telah menampilkan aktivitas seni dan pelbagai produk karya seni yang sejak semula terkait erat dengan persembahan untuk keperluan upacara keagamaan Hindu di *pura-pura (kahyangan)* untuk kepentingan kehidupan di keraton (*puri, istana raja, court art*) yaitu, hiburan dan keindahan bagi raja dan para bangsawan, elite kerajaan, dan untuk kepentingan rakyat yaitu hiburan dan keindahan yang dinikmati oleh masyarakat luas (*folk art*). Sejak itu berkembang pelbagai produk karya seni antara lain: seni lukis, seni ukir, seni patung, seni tari pertunjukan,

wayang, seni karawitan dan gamelan, seni sastra kekawin. Melalui kreativitas para seniman dan produk karya-karya seni mereka, kerajaan Gianyar di Bali semakin dikenal oleh wisatawan mancanegara (profil Kabupaten Gianyar 2005: Bab VII).

### **3. Kabupaten Gianyar “Kota Seni”, 1961 – 1980-an**

Kehadiran seniman-seniman berkebangsaan asing : Walter Spies dari Rusia dan Rudolf Bonnet dari Belanda pada tahun 1928 yang menetap di Ubud dapat dijadikan tonggak akulturasi terjadinya dinamika kebudayaan pada unsur karya seni. Atas inisiatif kedua seniman Barat yang memperoleh dukungan para bangsawan Ubud: Tjokorda Gde Raka Soekawati (punggawa Ubud), Tjokorda Gede Agung Soekawati dan Tjokorda Gede Rai (punggawa Peliatan) beserta para seniman Gianyar mereka bersama-sama membentuk sebuah organisasi modern pertama para seniman yaitu “Pita Maha” pada tanggal 29 Januari 1936. Keanggotaannya terdiri dari para pelukis, pemahat, pengukir, pengerajin anyaman, pengerajin perak dan emas hingga mencapai jumlah 159 orang di Ubud dan di luar Ubud sampai di Badung. Melalui pameran-pameran yang diselenggarakan di kota-kota di Bali (Singaraja), di Jawa: Bandung, Yogya, dan Batavia, Surabaya, Tegal, di Sumatra (Medan dan Palembang), di Kalimantan (Pontianak), bahkan hingga ke luar negeri (Amsterdam, Den Haag, London), organisasi seniman “Pita Maha” semakin luas dikenal. Akan tetapi selama pendudukan Jepang dan revolusi Indonesia aktivitas “Pita Maha” terhenti (“Pita Maha 29 Jan 1936 – 29 Jan 1940” *Djatayoe*, No. 7, 25 Feb 1940, Th 4, Singaradja: 195 – 202).

Selama masa revolusi, ketika daerah Bali termasuk ke dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT), otonomi daerah kerajaan/swapraja tetap diakui. Namun, semuanya itu dikoordinasikan dalam sebuah lembaga yang disebut Dewan Raja-raja. Raja Gianyar Ida A.A. Gde Oka, diangkat sebagai Ketua Dewan Raja-raja pada tahun 1947

menggantikan A.A. Pandji Tisna, raja Buleleng. Selain itu, pada periode NIT dua tokoh lainnya, yaitu Tjokorda Gde Rake Soekawati (Puri Kantor Ubud) diangkat menjadi presiden NIT dan Ide A.A. Gde Agung (Puri Agung Gianyar) menjadi Perdana Menteri NIT. Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, Undang-undang NIT No. 44 tanggal 15 Juni 1950 tetap diberlakukan. Daerah swapraja di wilayah NIT disebut dengan daerah bahagian/swapraja. Namun, untuk keseragaman pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Undang-undang No. 69 tahun 1958 yang mengubah daerah bahagian/swapraja menjadi daerah swatantra tingkat II (Daswati II). Daswati II itu berlaku secara seragam untuk seluruh Indonesia sampai tahun 1960.

Setelah itu, nama tersebut diganti lagi dengan nama daerah tingkat II (Dati II), Kabupaten Dati II, dan kabupaten. Dari sisi otonomi, jelas tampak proses perkembangan yang terjadi di kota Gianyar. Status otonomi dan berdaulat penuh melekat pada pemerintah Kerajaan Gianyar sejak 19 April 1771, yang terus berproses sampai otonomi daerah tingkat II kabupaten diberlakukan dewasa ini. Proses otonomi sejalan dengan dinamika kebudayaan yang tetap menunjukkan perkembangannya. Produk kesenian untuk kepentingan keraton (*puri*), tempat-tempat pemujaan Hindu (*pura*) baik yang diskralkan maupun yang diprofankan telah menyentuh pula kepentingan masyarakat dan bisa dinikmati oleh masyarakat lokal dan oleh masyarakat dunia melalui wisatawan yang datang ke Gianyar. Akibatnya nuansa seni semakin melekat dan memberi jatidiri terhadap daerahnya.

Setelah Pemilu I tahun 1955 timbul lagi inisiatif R. Bonnet, Tjokorda Gede Agung Sukawati dan beberapa seniman Ubud untuk menghimpun para seniman. Mereka mendirikan organisasi "Golongan Pelukis Ubud" pada tahun 1956. Ketuanya adalah A.A. Gede Sobrat. Kehadiran seorang pelukis Belanda yang menjadi warga negara Indonesia

Arie Smith pada tahun 1961 telah menciptakan pembauran lewat karya seni lukisan yang kemudian dikenal dengan aliran "*the young artist*". Gaya *young artist* menghasilkan lukisan-lukisan yang bertemakan kehidupan sehari-hari dengan polesan warna-warna cerah, kontras, bebas dan ekspresif (I Nyoman Suasta, 1981: 62 – 63).

Visi dan misi organisasi "Pita Maha" yaitu menampung hasil karya seniman-seniman berbakat sekaligus sebagai dokumentasi dan pameran yang mendunia terutama kota-kota di benua Eropa terwujud pada tahun 1959. Ketika itu didirikan sebuah museum yang diberi nama "Museum Puri Lukisan Ratna Warta" di Ubud. Museum ini cukup menarik kehadiran wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan karya seni yang terlukis dari bumi seniman di kabupaten Gianyar. Disusul dengan dibukanya museum lukisan oleh Pande Wayan Suteja Neka, seorang pelukis kelahiran tahun 1939 maka menambah semarak pengenalan jatidiri yang bernuansa senu untuk dipamerkan. Museum lukisan yang dibukanya sendiri pada tahun 1976 diberi nama "Museum Neka" diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 7 Juli 1982 ternyata mengundang antusias pada penikmat keindahan lewat karya-karya seni lukisan. Setelah itu berdiri pula museum-museum lukisan lainnya seperti "Museum Arma", "Museum Rudana" (Garrett Kam, 2002: 10 –11; Profil....2005: Bab VII). Dapat dikatakan bahwa berdirinya museum-museum seni lebih memperkaya lagi khazanah nuansa seni di Kabupaten Gianyar.

Untuk menampung produk karya-karya seni dan menjualnya kepada konsumen bermunculan pula bengkel kerja (*work shop*), studio-srudio, *galery-galery*, *artshop-artshop* yang tersebar di kecamatan-kecamatan hingga ke desa-desa di seluruh kabupaten Gianyar : Batubulan, Celuk, Guang, Sukawati, Bona, Gianyar, Ubud, Tegallalang, Kedewatan, dan lain-lain. Dari pihak pemerintah kabupaten Gianyar menjadi fasilitator pembangunan "Pasar Seni" di Sukawati pada tahun 1983 dan "Pasar Seni" di Blahbatuh pada tahun 1987. Selain itu pemerintah juga memfasilitasi tanah dan pembangunan

gedung Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI) di Ubud dan Guwang serta Sekolah Seni Karawitan di Batubulan. Atraksi kesenian seperti tari barong dan keris, kecak bisa ditemukan di desa-desa Singapadu, Bedulu dan Bona.

#### **4. Simpulan.**

Sesungguhnya dinamika kebudayaan yang melekat pada tepian ruang yaitu di Gianyar sejak dijadikan nama keraton (Puri Agung Gianyar) ibukota pusat pemerintahan kerajaan pada tahun 1771 hingga dijadikan nama ibukota kabupaten tahun 1960-an hingga sekarang tidak pernah kehilangan nuansa seni dan kreativitas para senimannya. Kota kabupaten Gianyar adalah buminya seniman dunia berakulturasi dengan seniman lokal yang telah menghasilkan kreativitas karya-karya seni penuh dinamika dari gaya klasik sampai gaya modern dan kontemporer, jadi sangatlah pantas apabila kabupaten Gianyar saat ini diberi predikat “Kota Seni” yang semula “Kota Keraton” berdasarkan realitas bukti-bukti dan fakta-fakta sejarah yang ditemukan.

Predikat bagi setiap kota sebagai pusat produk kebudayaan sebagian besar dapat dilacak hingga ke masa lampau. Tipologi dan keunikan-keunikan yang diciptakan para warganya telah menghasilkan identitas kota yang bersangkutan. Oleh karena itu seperti juga predikat yang diberikan kepada kota-kota: Jakarta, Yogyakarta, Pontianak, Polopo dan kota-kota muslim lainnya di Nusantara seperti dirujuk didepan maka untuk kabupaten Gianyar di propinsi Bali dengan segala dinamikanya saat ini sangat pantas diberi predikat “Kota Seni”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ide Anak Agung Gde, 1989. **Bali pada Abad XIX**. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- ANRI, 1964. **Surat-surat Perdjudjian antara Keradjaan-Keradjaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1841 s/d 1938**. Djakarta: ANRI.
- Babad Dalem : Teks dan Terjemahan**. Denpasar : Dinas P&K Propinsi Dati I Bali, 1986.
- Babad Dalem Sukawati**. Milik A.A. Gde Rai Puri Kandel Sukawati.
- Berg, C.C., 1932. **Babad Bla-Batuh**. Santpoort : C.A. Mees.
- Kaaden, van der W.F. **Nota van Toelichtingen Landschap Gianjar**. Singaradja, 1937.
- Kam, Garrett, 2002. **Suteja Neka dan Museum Neka**. Ubud : Yayasan Dharma Seni Museum Neka.
- Kuntowijoyo, 2002. **Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura, 1850 – 1940**. Yogyakarta : Mata Bangsa.
- Mahaudiana, 1968. **Babad Manggis Gianyar**. Gianyar : A.A. Gde Taman.
- Mahmud, M. Irfan, 2003. **Kota Kuno Palopo : Dimensi Fisik Sosial dan Kosmologi**. Makasar : Masagena Press.
- Paulus, J., 1917. **ENI**. s'- Gravenhage : Martinus Nijhoff.
- Peringatan 233 Tahun Kota Gianyar, 19 April 1771 – 19 April 2004**. Gianyar : Pemerintah Kabupaten Gianyar, 2004.
- Putra, dkk. 2003. **Sejarah Kerajaan Gianyar**. Tanpa Penerbit.
- Rahman, Ansar, dkk., 2000. **Syarif Abdurahman Alkadri Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak**. Pontianak : Pemerintah Kota Pontianak.
- Sartono, Kartodirdjo, 1977. **Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial**. Jakarta : Bharata.
- Selayang Pandang Profil Kabupaten Gianyar 2005**. Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- Suasta, I Nyoman, 1981. **“Pita Maha dan Perubahan Sosial di Ubud Tahun 1936 – 1942”, Skripsi**. Jurusan Sejarah FS UNUD Denpasar 1981.
- Suhartono WP, dkk., 2002. **Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 4 Januari 1946 –**

**27 Desember 1949.** Yogyakarta : Kanisius.

Sutaba, I Made, 1980. ***Prasejarah Bali***. Denpasar : Yayasan Purbakala Bali.

Tim Pengkajian FIB UGM, 2003. ***Laporan Akhir Kajian Hari Jadi Kota Yogyakarta***. Yogyakarta : FIB UGM.

Tjandrasasmita, H. Uka, 2000. ***Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia : Dari Abad XVIII Masehi***. Kudus : Menara Kudus.

Utrecht, E., 1962. ***Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok***. Bandung : Sumur Bandung.